



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN TELUK PAKEDAI

Jalan Pematang Mas No.58
TELUK PAKEDAI

Kode Pos 78383

**KEPUTUSAN CAMAT TELUK PAKEDAI
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN,
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI
KABUPATEN KUBU RAYA**

CAMAT TELUK PAKEDAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Teluk Pakedai, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, maka Kantor Kecamatan Teluk Pakedai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Teluk Pakedai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan di lingkungan Kantor Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Pakedai

Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

CAMAT TELUK PAKEDAI,

SUPRIADI

- Unit Organisasi : Kecamatan Teluk Pakedai
- Tugas Pokok : Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
- Fungsi : a. Penyusunan program kecamatan
 b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
 f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 h. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan
 i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
 j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
 k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
 l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan
 m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2022 KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA TAHUN 2023 | SATUAN | FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|---|-------------------------|---------------------------|--------|---|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | 70 / BB | Point | Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Bappedalitbang |
| 2 | Meningkatnya Status Desa | Jumlah Desa mandiri | 1 | Desa | IDM = $1/3 \times (IS \times IE \times IL)$ IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan | www.idm.kemendesa.go.id/ |

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
 KECAMATAN TELUK PAKEDAI TAHUN 2022**

| No | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | FORMULASI INDIKATOR | TARGET 2023 | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|-------------|--|
| 1 | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Total Realisasi Dokumen Perencanaan yang tersusun dibagi Total Target Dokumen Perencanaan yang akan di susun dikali 100 Persen | 100% | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |
| 2 | Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Total Realisasi Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun dibagi Total Target Dokumen Administrasi Keuangan yang akan di susun dikali 100 Persen | 100% | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |
| 3 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Total Realisasi Dokumen Administrasi BMD yang tersusun dibagi Total Target Dokumen Administrasi BMD yang akan di susun dikali 100 Persen | 100% | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 4 | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Total Realisasi Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang akan di susun dikali 100 Persen | 100% | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 5 | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah | Total Realisasi Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun dibagi Total Target Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang akan di susun dikali 100 Persen | 100% | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 6 | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Total Pengadaan Barang Milik Daerah | 5 Unit | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------------|--|
| 7 | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Total Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 8 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Total Barang Milik Daerah yang dipelihara | 41 Unit | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 9 | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Total Dokumen SKM yang telah tersusun dibagi Total Dokumen SKM yang ditargetkan dikali 100 Persen | 100% | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 10 | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Total Kegiatan yang telah direalisasikan dibagi Total Kegiatan yang direncanakan dikali 100 Persen | 100% | Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 11 | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan | Total Kegiatan yang dilaksanakan | 2 Kegiatan | Seksi Perekonomian Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 12 | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Desa yang Dibina | Total Desa yang dibina | 6 Desa | Seksi Ketentraman dan Ketertiban |
| 13 | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan | Total Kegiatan yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 14 | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Dibina | Total Desa yang dibina | 6 Desa | Seksi Perekonomian Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemerintahan |

**INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN (IKSK)
KECAMATAN TELUK PAKEDAI TAHUN 2022**

| No | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN | FORMULASI INDIKATOR | TARGET 2023 | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|----------------|--|
| 1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Total dokumen perencanaan perangkat daerah | 5 Dokumen | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |
| 2 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Total Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |
| 3 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Total Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |
| 4 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Total ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | 14 Orang/Bulan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 5 | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Total Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 1 Laporan | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-------------|--|
| 6 | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD | Total Laporan Bulanan dan Semesteran Perangkat Daerah | 13 Laporan | Bagian Rencana Kerja dan Keuangan |
| 7 | Tersedianya Rencana Kebijakan Perangkat | Jumlah Rencana Kebijakan Perangkat | Total Dokumen Rencana Kebutuhan Perangkat Milik Daerah | 1 Dokumen | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 8 | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Total Dokumen Pengamanan BMD | 1 Dokumen | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 9 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Total Laporan Penatausahaan BMD | 1 Laporan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 10 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Total Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20 Stel | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 11 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Total Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik kantor | 4 paket | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 12 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Total Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4 paket | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 13 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Total Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4 paket | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 14 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Total Laporan Perjalanan Dinas | 206 Laporan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 15 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Total Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin | 6 Unit | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 16 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Total Laporan Penyediaan Listrik Kantor | 12 Laporan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 17 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Total Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Laporan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 18 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Total Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara | 10 Unit | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 19 | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Total Laporan SKM yang disusun | 2 Laporan | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |
| 20 | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Total Dokumen perizinan non usaha yang disusun | 80 Dokumen | Seksi Perekonomian dan Pembangunan |
| 21 | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Total Laporan Pelaksanaan Non Perizinan | 40 Laporan | Seksi Pemerintahan |
| 22 | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Total Laporan Pelaksanaan Kegiatan kewenangan lain yang dilimpahkan | 3 Laporan | Seksi Kesejahteraan Rakyat |

| | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------------|--|
| 23 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Total Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang | 14 Lembaga Masyarakat | Seksi Perekonomian dan Pembangunan |
| 24 | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Total Laporan Kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat yang disusun | 1 Laporan | Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 25 | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Total Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 78 Laporan | Seksi Ketentraman dan Ketertiban |
| 26 | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Total Orang yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan | 220 Orang | Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Umum |

| | | | | | |
|----|---|---|--|------------|------------------------------------|
| 27 | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Total Dokumen pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa | 2 Dokumen | Seksi Pemerintahan |
| 28 | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Total Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | Seksi Pemerintahan |
| 29 | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Total Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | Seksi Kesejahteraan Rakyat |
| 30 | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Total Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 Dokumen | Seksi Pemerintahan |
| 31 | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Total Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 78 Laporan | Seksi Perekonomian dan Pembangunan |



[Handwritten Signature]
 SUPRIADI